

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek Kimia Farma 43 Malang adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di Apotek dengan lebih baik.
- b. Apotek harus lebih tekun dalam menerapkan pelayanan, meningkatkan pencatatan *patient medication record* yang sangat penting untuk merangkum pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien.
- c. Pemberian KIE kepada pasien harus lebih ditingkatkan lagi. Pemberian KIE tidak hanya sekedar memberitahukan tujuan dan cara penggunaan obat. Lebih dari itu, Apoteker harus menggali data pasien agar dapat mencegah terjadinya *drug related problem*, Apoteker juga harus memberitahukan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal penting lainnya terkait obat seperti efek samping, waktu kadaluarsa (obat racikan), dan cara penyimpanan obat.
- d. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah di gunakan, di sinilah peran apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan swamedikasi.

- e. Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep untuk itu di setiap tahapan pengerjaan resep petugas di harapkan membubuhkan paraf mulai dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan obat.
- f. Apotek Kimia Farma dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan menerapkan program apotek *online* yang menyediakan obat-obatan yang bersifat promotif dan preventif, dengan adanya program *online* kemungkinan penjualan produk-produk seperti vitamin dapat meningkat.
- g. Para pegawai Apotek Kimia Farma 43 hendaknya menerapkan sistem pencatatan obat keluar-masuk dengan benar untuk menghindari terjadinya ketidakcocokan antara stok fisik, kartu stok, maupun stok di komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. 2005, *Manajemen Farmasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Drugs.com. 2017. *Drugs.com: Know more. Be Sure.* <http://www.drugs.com> [online]. Diakses pada November 2017.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/ PP.IAI/1418/VII/2014 tentang *Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker*, Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.
- Katz, P.O., Gerson, LB., and Vela, M.F., 2013, *Corrigendum: Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease*, (108), USA.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang *Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : TU.08.03/IV/1400/2011 tentang *Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang *Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380 Tahun 1983 tentang *Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang *Obat Wajib Apotek*.
- Lacy, C.F. *et al.* 2008. *Drug Information Handbook* 17TH Edition. American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- MIMS Indonesia, 2016. MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 15, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang *Izin Produksi Kosmetika*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 1974 tentang *Produksi dan Distribusi Obat Tradisional*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1989 tentang *Kewajiban Menuliskan Resep dan atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang *Kriteria Obat yang Dapat diserahkan Tanpa Resep.*

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi* ed. 3, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.